



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: KP 487 / DJPL / 2021

TENTANG

PENETAPAN KODE PELABUHAN LAUT DAN STANDARDISASI PENETAPAN
KODE PELABUHAN LAUT, TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS, TERMINAL
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG
DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN DAN WILAYAH TERTENTU DI DARATAN
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan daftar nama lokasi pelabuhan yang unik dan jelas dengan sistem pengkodean maka diperlukan standardisasi kode pelabuhan;
 - b. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/4/14/DJPL-15 tentang Penetapan Kode Pelabuhan Laut, telah ditetapkan kode-kode pelabuhan yang terdapat di dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin kelancaran arus barang diperlukan evaluasi kembali kode pelabuhan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan pembaharuan dan penetapan kode pelabuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Penetapan Kode Pelabuhan Laut, dan Standarisasi Usulan Penetapan Kode Pelabuhan Laut, Terminal Umum, Terminal Khusus dan/atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

Mengingat...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN KODE PELABUHAN LAUT DAN STANDARDISASI PENETAPAN KODE PELABUHAN LAUT, TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS, TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN DAN WILAYAH TERTENTU DI DARATAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN.

PERTAMA : Menetapkan Kode Pelabuhan Laut dan Standardisasi Penetapan Kode Pelabuhan Laut, Terminal Umum, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan dan Wilayah Tertentu Di Daratan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA...

- KEDUA : Kode Pelabuhan Laut ditetapkan sesuai dengan lokasi pelabuhan laut berdasarkan Sub Lampiran A1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020.
- KETIGA : Kode Pelabuhan Laut yang belum ditetapkan kode pelabuhannya, ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan sesuai Standardisasi Penetapan Kode Pelabuhan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Kode Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan dan Wilayah Tertentu Di Daratan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha sesuai Standardisasi Penetapan Kode Pelabuhan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Penyelenggara Pelabuhan wajib menetapkan Kode Terminal Umum, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sesuai Standardisasi Penetapan Kode Terminal Umum, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Kode Terminal Umum, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan diberitahukan secara luas, sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan dan akan diintegrasikan datanya melalui aplikasi sistem informasi elektronik.
- KETUJUH : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor PP.001/4/14/DJPL-15 tentang Penetapan Kode Pelabuhan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SEMBILAN...

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada Tanggal 22 APRIL

2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri BUMN;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
14. Direktur Jenderal Imigrasi;
15. Badan Karantina Pertanian;
16. Kepala Lembaga *National Single Window*;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
18. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
19. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
20. Para Kepala Kantor Pelabuhan Khusus Batam;
21. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
22. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

Nomor : KP.487 / DJPL / 2021

Tanggal : 27 APRIL 2021

LOKASI DAN KODE PELABUHAN

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
1	Aceh	Aceh Barat	1	Meulaboh	ID	MEQ
2		Aceh Barat Daya	2	Susoh	ID	SUS
3		Aceh Jaya	3	Calang	ID	CLG
4		Aceh Selatan	4	Tapaktuan	ID	TPK
5		Aceh Selatan	5	Sibadeh	ID	SAH
6		Aceh Singkil	6	Singkil	ID	SNL
7		Aceh Singkil	7	P. Banyak	ID	BYK
8		Aceh Timur	8	Idi	ID	III
9		Aceh Utara	9	Lhokseumawe/ Kreung Geukeh	ID	LSW
10		Aceh Besar	10	Malahayati	ID	MLH
11		Langsa	11	Kuala Langsa	ID	KUA
12		Pidie	12	Sigli	ID	SII
13		Sabang	13	Sabang	ID	SBG
14		Simeulue	14	Sinabang	ID	SNG
15		Simeulue	15	Sibigo	ID	SBO
16	Sumatera Utara	Asahan	1	Tg. Balai Asahan /Teluk Nibung	ID	TSH
17		Asahan	2	Bagan Asahan	ID	BNH
18		Batubara	3	Kuala Tanjung	ID	KTJ
19		Batubara	4	Pangkalan Dodek	ID	PDD
20		Batubara	5	Tanjung Tiram	ID	RAM
21		Gunung Sitoli	6	Gunung Sitoli	ID	GNS
22		Labuhan Batu	7	Sei Barombong	ID	SBE
23		Labuhan Batu	8	Tanjung Sarang Elang	ID	SEL
24		Labuhan Batu Utara	9	Teluk Leidong	ID	LIG
25		Langkat	10	Pangkalan Susu	ID	PKS
26		Langkat	11	Pangkalan Brandan	ID	PKR
27		Langkat	12	Pulau Kampai	ID	PKA
28		Langkat	13	Tanjung Pura	ID	TPU
29		Mandailing Natal	14	Natal / Sikara- kara	ID	NAL
30		Mandailing Natal	15	Parlimbungan Ketek	ID	TEK
31		Medan	16	Belawan	ID	BLW

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
32		Nias Barat	17	Sirombu	ID	SRU
33		Nias Selatan	18	Pulau Tello	ID	PTE
34		Nias Selatan	19	Teluk Dalam	ID	TDA
35		Nias Utara	20	Lahewa	ID	LHA
36		Serdang Bedagai	21	Tanjung Beringin	ID	TBE
37		Serdang Bedagai	22	Pantai Cermin	ID	PCE
38		Sibolga	23	Sibolga	ID	SLG
39		Tapanuli Tengah	24	Barus	ID	BRS
40		Tapanuli Tengah	25	Oswald Siahaan / Labuhan Angin	ID	ONN
41	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	1	Siberut / Simailepet	ID	MSB
42		Kep. Mentawai	2	Sikakap	ID	SIK
43		Kep. Mentawai	3	Sioban	ID	SON
44		Kep. Mentawai	4	Sikabalu / Pokai	ID	SKB
45		Kep. Mentawai	5	Tua Pejat	ID	TPT
46		Kep. Mentawai	6	Pasapuat	ID	APU
47		Padang	7	Teluk Bayur	ID	TBR
48		Padang	8	Muara Padang	ID	MPG
49		Pasaman Barat	9	Teluk Tapang	ID	TFG
50		Pasaman Barat	10	Air Bangis	ID	ABS
51		Pesisir Selatan	11	Carocok Painan	ID	CON
52	Kepulauan Riau	Batam	1	Batam / Batu Ampar	ID	BUR
53		Batam	2	Pulau Sambu	ID	PSS
54		Bintan	3	Sei Kolak Kijang	ID	KID
55		Bintan	4	Tanjung Berakit	ID	TBI
56		Bintan	5	Tanjung Uban / Bulang Linggi	ID	TAN
57		Karimun	6	Malarko	ID	MLO
58		Karimun	7	Parit Rempak	ID	PTK
59		Karimun	8	Tanjung Balai Karimun	ID	TJB
60		Karimun	9	Tanjung Batu Kundur	ID	TBD
61		Karimun	10	Tanjung Tiram	ID	TRM
62		Kep. Anambas	11	Tarempa	ID	TMP
63		Kep. Anambas	12	Letung	ID	LTG
64		Lingga	13	Dabo Singkep	ID	DAS
65		Lingga	14	Pekajang	ID	PJN
66		Lingga	15	Senayang	ID	SAG
67		Natuna	16	Selat Lampa	ID	STA
68		Natuna	17	Midai	ID	MDA

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
69		Natuna	18	Pulau Seluan	ID	PUN
70		Natuna	19	Pulau Laut	ID	PUT
71		Natuna	20	Ranai	ID	RNI
72		Natuna	21	Sedanau	ID	SDU
73		Natuna	22	Serasan	ID	SRN
74		Natuna	23	Subi	ID	SUI
75		Tanjung Pinang	24	Tanjung Pinang	ID	TNJ
76		Tanjung Pinang	25	Dompak	ID	DMK
77		Tanjung Pinang	26	Tanjung Moco	ID	MCO
78	Riau	Bengkalis	1	Batu Panjang	ID	BPA
79		Bengkalis	2	Bengkalis	ID	BKI
80		Bengkalis	3	Sungai Pakning	ID	SEQ
81		Bengkalis	4	Tanjung Medang	ID	TMD
82		Dumai	5	Dumai	ID	DUM
83		Indragiri Hilir	6	Kuala Enok	ID	ENO
84		Indragiri Hilir	7	Kuala Gaung	ID	KGQ
85		Indragiri Hilir	8	Sungai Guntung	ID	SUQ
86		Indragiri Hilir	9	Tembilahan	ID	TLN
87		Indragiri Hulu	10	Rengat/Kuala Cinaku	ID	RGT
88		Kep.Meranti	11	Selat Panjang	ID	SPA
89		Kep.Meranti	12	Meranti/Dorak	ID	MRT
90		Pekanbaru	13	Pekanbaru	ID	PKU
91		Rokan Hilir	14	Bagan Siapi-api	ID	BII
92		Rokan Hilir	15	Panipahan	ID	PIN
93		Rokan Hilir	16	Sinaboi	ID	SNI
94		Rokan Hilir	17	Batu Enam	ID	BAM
95		Siak	18	Tanjung Buton	ID	BUT
96	Bengkulu	Bengkulu	1	Pulau Baai	ID	BKS
97		Bengkulu Utara	2	Malakoni/P. Enggano	ID	MKI
98		Kaur	3	Bintuhan/Linau	ID	LBI
99		Muko - Muko	4	Muko-Muko	ID	MPC
100	Jambi	Muaro Jambi	1	Talang Duku	ID	TNU
101		Tg. Jabung Barat	2	Kuala Tungkal	ID	KTK
102		Tg. Jabung Timur	3	Kuala Mendahara	ID	KME
103		Tg. Jabung Timur	4	Muara Sabak	ID	MSK
104		Tg. Jabung Timur	5	Nipah Panjang	ID	NIP
105		Tg. Jabung Timur	6	Ujung Jabung	ID	UJB
106	Sumatera Selatan	Banyuasin	1	Tanjung Api-Api	ID	TGP
107		Banyuasin	2	Sungsang	ID	SSG

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
108		Banyuasin	3	Karang Agung	ID	KGG
109		OKI	4	Mesuji	ID	MEJ
110		OKI	5	Sungai Lumpur	ID	SLU
111		Palembang	6	Boom Baru/ Palembang	ID	BRU
112		Palembang	7	Kertapati	ID	KTI
113	Bangka Belitung	Bangka	1	Belinyu	ID	BLU
114		Bangka Barat	2	Muntok	ID	MUO
115		Bangka Seiatan	3	Toboali	ID	TBL
116		Bangka Selatan	4	Sadai	ID	SDI
117		Belitung	5	Tanjung Batu	ID	TBT
118		Belitung	6	Tanjung Pandan	ID	TJQ
119		Belitung Timur	7	Manggar	ID	MAN
120		Pangkalpinang	8	Pangkal Balam	ID	PGX
121	Lampung	Bandar Lampung	1	Panjang	ID	PJG
122		Bandar Lampung	2	Teluk Betung	ID	TBG
123		Lampung Selatan	3	Sebalang	ID	SEL
124		Lampung Timur	4	Labuhan Maringgai	ID	LMA
125		Mesuji	5	Mesuji	ID	MSJ
126		Tanggamus	6	Kota Agung/ Batu Balai	ID	KAG
127		Tulang Bawang	7	Menggala	ID	MGA
128		Lampung Selatan	8	Lagundi	ID	LGI
129		Lampung Selatan	9	Kalianda	ID	KND
130		Lampung Selatan	10	P. Sebesi	ID	SAI
131		Tanggamus	11	P. Tabuan	ID	PTB
132	Banten	Cilegon	1	Banten/ Ciwandan	ID	BTN
133		Pandeglang	2	Labuhan	ID	LAJ
134		Serang	3	Anyer Lor	ID	ALO
135		Serang	4	Bojonegara	ID	BGA
136		Serang	5	Karangantu	ID	KNU
137		Serang	6	Cituis	ID	CTS
138		Tangerang	7	Kressek/Kronjo	ID	KEK
139	Jawa Barat	Cirebon	1	Cirebon	ID	CBN
140		Indramayu	2	Indramayu/ Losarang	ID	IRU
141		Pangandaran	3	Pangandaran/ Bojongsalawe	ID	PAN
142		Subang	4	Pamanukan - Patimban	ID	PNN
143		Subang	5	Patimban	ID	PMB
144		Sukabumi	6	Pelabuhan Ratu	ID	PRA

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
145	DKI Jakarta	Jakarta Utara	1	Kalibaru	ID	KIU
146		Jakarta Utara	2	Marunda	ID	MRA
147		Jakarta Utara	3	Muara Angke	ID	MKA
148		Jakarta Utara	4	Muara Baru	ID	MBA
149		Jakarta Utara	5	Sunda Kelapa	ID	SKL
150		Jakarta Utara	6	Tg. Priok	ID	JKT
151		Kep. Seribu	7	Kep. Seribu (P. Pramuka)	ID	KSB
152	Jawa Tengah	Batang	1	Batang	ID	BTG
153		Brebes	2	Brebes	ID	BRE
154		Cilacap	3	Tanjung Intan	ID	CXP
155		Jepara	4	Jepara	ID	JEP
156		Jepara	5	Karimun Jawa	ID	KJA
157		Jepara	6	Legok Bajak	ID	LKK
158		Kendal	7	Kendal	ID	KDL
159		Pati	8	Juwana	ID	JWA
160		Pekalongan	9	Pekalongan	ID	PEX
161		Pemalang	10	Pemalang	ID	PML
162		Rembang	11	Rembang/ Tasik Agung	ID	REM
163		Rembang	12	Rembang/Sluke	ID	RNE
164		Semarang	13	Tanjung Emas	ID	SRG
165		Tegal	14	Tegal	ID	TEG
166	Jawa Timur	Bangkalan	1	Telaga Biru	ID	TGU
167		Banyu Wangi	2	Tanjung Wangi	ID	BJU
168		Banyu Wangi	3	Ketapang	ID	KTP
169		Banyu Wangi	4	Banyu Wangi/Boom	ID	BWB
170		Gresik	5	Bawean	ID	BWN
171		Gresik	6	Gresik	ID	GRE
172		Lamongan	7	Brondong	ID	BNQ
173		Lamongan	8	Tanjung Pakis (LIS)	ID	TPS
174		Pacitan	9	Pacitan	ID	PAC
175		Pamekasan	10	Branta	ID	SNP
176		Pamekasan	11	Pasean	ID	PSN
177		Pasuruan	12	Pasuruan	ID	PAZ
178		Kota Probolinggo	13	Probolinggo/ Tg. Tembaga	ID	PRO
179		Probolinggo	14	Giliketapang	ID	GEG
180		Sampang	15	Glimandangin	ID	GNN
181		Sampang	16	Sampang	ID	SPG
182		Sampang	17	Taddan	ID	TAD

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
183		Situbondo	18	Kalbut	ID	KSO
184		Situbondo	19	Panarukan	ID	PRN
185		Sumenep	20	Kalianget	ID	KAT
186		Sumenep	21	Masalembo	ID	MSI
187		Sumenep	22	Sapudi	ID	SPI
188		Sumenep	23	Sapeken	ID	SPN
189		Sumenep	24	Kangean	ID	KNN
190		Sumenep	25	Keramaian	ID	KRN
191		Sumenep	26	P. Raas	ID	RRS
192		Surabaya	27	Tanjung Perak	ID	SUB
193	Bali	Buleleng	1	Buleleng (Sangsit)	ID	BUG
194		Buleleng	2	Celukan Bawang	ID	CEB
195		Denpasar	3	Benoa	ID	BOA
196		Jembrana	4	Gilimanuk	ID	GIL
197		Karangasem	5	Labuan Amuk/ Tanahampo	ID	LKO
198		Karangasem	6	Padang Bai	ID	PBI
199		Klungkung	7	Nusa Penida (Toyapakeh)	ID	NPE
200	Nusa Tenggara Barat	Bima	1	Bima	ID	BMU
201		Bima	2	Sape	ID	SPE
202		Bima	3	Waworada	ID	WOA
203		Dompu	4	Calabai	ID	CLI
204		Dompu	5	Kempo	ID	KEM
205		Lombok Barat	6	Lembar	ID	LMR
206		Lombok Barat	7	Ampenan	ID	AMP
207		Lombok Timur	8	Labuhan Lombok	ID	LLO
208		Lombok Timur	9	Labuhan Haji	ID	LHJ
209		Lombok Utara	10	Pemenang	ID	MEN
210		Lombok Utara	11	Carik	ID	CRI
211		Sumbawa	12	Badas	ID	PBB
212		Sumbawa Barat	13	Benete	ID	BEN
213	Nusa Tenggara Timur	Alor	1	Baranusa	ID	BAA
214		Alor	2	Kalabahi	ID	KBH
215		Alor	3	Maritaing	ID	MRG
216		Alor	4	Moru	ID	MOU
217		Belu	5	Atapupu	ID	AAU
218		Ende	6	Ende	ID	ENE
219		Ende	7	Ippi	ID	IPi
220		Ende	8	Maurole	ID	MUE
221		Ende	9	Pulau Ende	ID	PDE

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
222		Flores Timur	10	Larantuka	ID	LKA
223		Flores Timur	11	Lamakera	ID	LKR
224		Flores Timur	12	Mananga	ID	MMJ
225		Flores Timur	13	Tabilota	ID	ILO
226		Flores Timur	14	Terong	ID	TOQ
227		Flores Timur	15	Waiwadan	ID	WWN
228		Flores Timur	16	Waiwuring	ID	WWR
229		Kupang	17	Oepoli	ID	OPI
230		Kupang	18	Tenau/ Kupang	ID	KOE
231		Kupang	19	Naikliu	ID	NIU
232		Kupang	20	Nunbaun Sabu (Namosain)	ID	NUN
233		Lembata	21	Balauring	ID	BRG
234		Lembata	22	Lewoleba	ID	LWE
235		Lembata	23	Wulandoni	ID	WDO
236		Manggarai	24	Reo	ID	REO
237		Manggarai	25	P. Mules	ID	MEL
238		Manggarai Barat	26	Labuan Bajo	ID	LBO
239		Manggarai Barat	27	Komodo	ID	KMD
240		Manggarai Timur	28	Pota	ID	POA
241		Manggarai Timur	29	Waiwole	ID	WIE
242		Nagekeo	30	Marapokot	ID	MOT
243		Ngada	31	Maumbawa	ID	MMA
244		Ngada	32	Riung	ID	RIG
245		Rote Ndao	33	Baa	ID	BRO
246		Rote Ndao	34	Ndao	ID	NOO
247		Rote Ndao	35	Batutua	ID	NBA
248		Rote Ndao	36	Papela	ID	NPA
249		Sabu Raijua	37	Seba	ID	SEA
250		Sabu Raijua	38	Biu	ID	BBU
251		Sabu Raijua	39	Raijua	ID	RIA
252		Sikka	40	Maumere / Lorens Say	ID	MOF
253		Sikka	41	Palue	ID	PAE
254		Sikka	42	Wuring	ID	WRG
255		Sumba Barat	43	Binanatu	ID	BTU
256		Sumba Barat Daya	44	Waikelo	ID	WIO
257		Sumba Tengah	45	Mamboro	ID	MMO
258		Sumba Timur	46	Waingapu	ID	WGP
259		Sumba Timur	47	Baing	ID	BAG

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
260		Sumba Timur	48	Pulau Salura	ID	PUA
261		Timor Tengah Selatan	49	Kolbano	ID	KNY
262		Timor Tengah Utara	50	Wini	ID	WII
263	Kalimantan Barat	Kayong Utara	1	Teluk Melano / Teluk Batang	ID	TMO
264		Kayong Utara	2	Tanjung Satai	ID	TAI
265		Ketapang	3	Kendawangan	ID	KDW
266		Ketapang	4	Ketapang	ID	KTG
267		Kubu Raya	5	Teluk Air / Padang Tikar	ID	PTA
268		Mempawah	6	Mempawah	ID	MPH
269		Pontianak	7	Pontianak	ID	PNK
270		Sambas	8	Sintete	ID	SNE
271		Sambas	9	Paloh / Sakura	ID	PAH
272		Kayong Utara	10	Karimata	ID	KIA
273		Singkawang	11	Singkawang	ID	SKW
274		Kayong Utara	12	Sukadana	ID	SDN
275	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	1	Rangga Ilung	ID	RGG
276		Kapuas	2	Batanjung	ID	BAN
277		Katingan	3	Pegatan Mendawai	ID	PMI
278		Kotawaringin Barat	4	Kumai	ID	KUM
279		Kotawaringin Barat	5	Pangkalan Bun	ID	PKN
280		Kotawaringin Timur	6	Sampit	ID	SMQ
281		Kotawaringin Timur	7	Samuda	ID	SMA
282		Palangkaraya	8	Kereng Bengkirai	ID	KBE
283		Pulang Pisau	9	Pulang Pisau	ID	PPS
284		Seruyan	10	Kuala Pembuang	ID	KPE
285		Seruyan	11	Teluk Sigintung / Seruyan	ID	TTN
286		Sukamara	12	Sukamara	ID	SAA
287		Sukamara	13	Kuala Jelay	ID	KAY
288	Kalimantan Utara	Bulungan	1	Bunyu	ID	BYQ
289		Bulungan	2	Tanjung Selor Kayu / Kayan I	ID	TJS
290		Nunukan	3	Nunukan / Tunon Taka	ID	NNX
291		Nunukan	4	Sungai Nyamuk / Sebatik	ID	SNY
292		Tana Tidung	5	Sesayap	ID	SYP
293		Tarakan	6	Tarakan / Malundung	ID	TRK

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
294	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	1	Banjarmasin	ID	BDJ
295		Kotabaru	2	Kota Baru	ID	KBU
296		Kotabaru	3	Marabatuan	ID	MBN
297		Kotabaru	4	Matasiri	ID	MSR
298		Kotabaru	5	Sebuku	ID	SEI
299		Kotabaru	6	Serongga	ID	SGG
300		Kotabaru	7	Tanjung Batu	ID	TBA
301		Tanah Bumbu	8	Satui/Sel Danau	ID	STU
302		Tanah Laut	9	Kintap	ID	KNP
303		Tanah Laut	10	Pelaihari/Swaran gan	ID	PHI
304	Kalimantan Timur	Balikpapan	1	Balikpapan	ID	BPN
305		Berau	2	Mataritip	ID	MRP
306		Berau	3	Tanjung Redep	ID	TRE
307		Bontang	4	Lhok Tuan	ID	LTU
308		Bontang	5	Tanjung Laut	ID	TLA
309		Kutai Kertanegara	6	Kuala Semboja	ID	KSA
310		Kutai Kertanegara	7	Tanjung Santan	ID	TSX
311		Kutai Timur	8	Maloy	ID	MAY
312		Kutai Timur	9	Sangatta	ID	SGQ
313		Kutai Timur	10	Sangkulirang	ID	SKI
314		Paser	11	Tana Paser	ID	THR
315		Penajam Paser Utara	12	Penajam Paser	ID	PPR
316		Samarinda	13	Samarinda	ID	SRI
317	Sulawesi Utara	B. Mangondow	1	Labuhan Uki	ID	LUK
318		B. Mangondow Selatan	2	Torosik	ID	TOK
319		B. Mangondow Timur	3	Kotabunan	ID	KAN
320		B. Mangondow Utara	4	Tg. Sidupa	ID	SDQ
321		Bitung	5	Bitung	ID	BIT
322		Kep. Sangihe	6	Petta	ID	PEA
323		Kep. Sangihe	7	Tahuna	ID	THA
324		Kep. Sangihe	8	Bukide	ID	BKE
325		Kep. Sangihe	9	Kahakitang	ID	KKG
326		Kep. Sangihe	10	Kalama	ID	KLM
327		Kep. Sangihe	11	Kawaluso	ID	KAO
328		Kep. Sangihe	12	Kawio	ID	KWO
329		Kep. Sangihe	13	Lipang	ID	LPG
330		Kep. Sangihe	14	Makalehi	ID	MKH

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
331		Kep. Sangihe	15	Marore	ID	MRE
332		Kep. Sangihe	16	Matutuang	ID	MTT
333		Kep. Sangihe	17	Ngalipaeng	ID	NIG
334		Kep. Sangihe	18	Para	ID	PAR
335		Kep. Sitaro	19	Ulu Siau	ID	USI
336		Kep. Sitaro	20	Biaro	ID	BIA
337		Kep. Sitaro	21	Buhias	ID	BHS
338		Kep. Sitaro	22	Pehe	ID	PEE
339		Kep. Sitaro	23	Sawang	ID	SWG
340		Kep. Sitaro	24	Tagulandang	ID	TGL
341		Kep. Talaud	25	Karatung	ID	KTN
342		Kep. Talaud	26	Lirung	ID	LRG
343		Kep. Talaud	27	Miangas	ID	MGS
344		Kep. Talaud	28	Beo	ID	BEO
345		Kep. Talaud	29	Dapalan	ID	DPN
346		Kep. Talaud	30	Essang	ID	ESG
347		Kep. Talaud	31	Kakorotan	ID	KON
348		Kep. Talaud	32	Mangarang	ID	MGR
349		Kep. Talaud	33	Marampit	ID	MAT
350		Kep. Talaud	34	Melangoane	ID	MGE
351		Kep. Talaud	35	Rainis	ID	RIS
352		Manado	36	Manado	ID	MDC
353		Minahasa Selatan	37	Amurang	ID	TZD
354		Minahasa Tenggara	38	Belang	ID	BLG
355		Minahasa Utara	39	Likupang	ID	LUG
356		Minahasa Utara	40	Munte/Likupang Barat	ID	MKT
357	Gorontalo	Boalemo	1	Tilamuta	ID	TAA
358		Gorontalo	2	Gorontalo	ID	GTO
359		Gorontalo Utara	3	Anggrek	ID	AGK
360		Gorontalo Utara	4	Kwandang	ID	KWG
361		Pohuwato	5	Bumbulan	ID	BBN
362	Sulawesi Barat	Majene	1	Majene	ID	MAJ
363		Majene	2	Palipi	ID	PLI
364		Mamuju	3	Ambo	ID	ABO
365		Mamuju	4	Belang-Belang	ID	BBM
366		Mamuju	5	Budong-Budong	ID	BDG
367		Mamuju	6	Mamuju	ID	MJU
368		Mamuju	7	Poongpongan	ID	ONG
369		Mamuju Utara	8	Pasang Kayu	ID	AYU

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
370	Sulawesi Tengah	Polewali Mandar	9	Tanjung Silopo/ Polewali	ID	PEI
371		Banggai	1	Bunta	ID	BUD
372		Banggai	2	Pagimana	ID	PGM
373		Banggai	3	Luwuk	ID	LUW
374		Banggai	4	Tangkiang	ID	TQG
375		Banggai Kepulauan	5	Banggai	ID	BGG
376		Banggai Kepulauan	6	Salakan	ID	SAL
377		Buol	7	Leok	ID	LEK
378		Buol	8	Paleleh	ID	PLH
379		Donggala	9	Donggala	ID	DNA
380		Donggala	10	Ogoamas	ID	OOS
381		Donggala	11	Wani	ID	WNQ
382		Morowali	12	Bungku	ID	BNU
383		Morowali Utara	13	Manui	ID	MNY
384		Morowali Utara	14	Baturube	ID	BUB
385		Morowali	15	Kolonedale	ID	KNL
386		Palu	16	Pantoloan	ID	PTL
387		Parigi Moutong	17	Parigi	ID	PRI
388		Parigi Moutong	18	Moutong	ID	MUG
389		Parigi Moutong	19	Tinombo	ID	TOM
390		Poso	20	Poso	ID	PSJ
391		Tojo Una-Una	21	Ampana	ID	APN
392		Tojo Una-Una	22	Malenge	ID	MEE
393		Tojo Una-Una	23	Mantangisi	ID	MIS
394		Tojo Una-Una	24	Pasokan	ID	ASO
395		Tojo Una-Una	25	Popolii	ID	PPI
396		Tojo Una-Una	26	Una-Una	ID	UAA
397		Tojo Una-Una	27	Wakai	ID	WAK
398		Toli-Toli	28	Toli-toli	ID	TLI
399		Toli-Toli	29	Malala	ID	MLA
400	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	1	Bau-Bau/ Marhum	ID	BAU
401		Bau-Bau	2	Binongko	ID	BUM
402		Bombana	3	Boepinang	ID	BOE
403		Bombana	4	Kasipute	ID	KIE
404		Bombana	5	Sikeli	ID	SKE
405		Buton	6	Banabungi Pasarwajo	ID	BBI
406		Buton	7	Lasalimu	ID	LLU
407		Buton	8	Lawelee	ID	LWL

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
408		Buton Selatan	9	Batu Atas	ID	BTS
409		Buton Selatan	10	Kadatua	ID	KDT
410		Buton Selatan	11	Siompu	ID	SOU
411		Buton Tengah	12	Liana Banggai	ID	LNB
412		Buton Tengah	13	Talaga Raya	ID	GRY
413		Buton Tengah	14	Wamengkoli	ID	WGK
414		Buton Utara	15	Ereke	ID	ERE
415		Kendari	16	Kendari/ Bungkutoko	ID	KDI
416		Kolaka	17	Kolaka	ID	KOL
417		Kolaka	18	Pomala	ID	PUM
418		Kolaka Utara	19	Watunohu	ID	WUU
419		Konawe Kepulauan	20	Langara	ID	LNA
420		Konawe Selatan	21	Lakara	ID	LQR
421		Konawe Selatan	22	Lapuko	ID	LPO
422		Konawe Utara	23	Lameluru	ID	LUU
423		Konawe Utara	24	Molawe	ID	MLW
424		Muna	25	Raha	ID	RAQ
425		Muna	26	Malingano	ID	MIO
426		Wakatobi	27	Wanci	ID	WCI
427		Wakatobi	28	Kaledupa	ID	KDA
428	Sulawesi Selatan	Bantaeng	1	Bantaeng/ Bonthain	ID	BGN
429		Barru	2	Garongkong	ID	GNG
430		Barru	3	Awarange/ Barru	ID	AGU
431		Bone	4	Bajoe	ID	BAE
432		Bone	5	Pattirobajo	ID	PIO
433		Bulukumba	6	Bulukumba/ Lappe'e	ID	BBE
434		Pangkajene Kepulauan	7	Maccini Baji	ID	MII
435		Jeneponto	8	Jeneponto/ Bunging	ID	JEO
436		Luwu	9	Ulo-Ulo/Belopa	ID	UOA
437		Luwu Timur	10	Malili (Sungai)	ID	MLI
438		Luwu Timur	11	Lampia	ID	LPI
439		Luwu Utara	12	Munte	ID	MTE
440		Makasar	13	Makasar/ Makasar NewPort	ID	MAK
441		Palopo	14	Palopo/Tg. Ringgit	ID	PPO
442		Pangkajene Kepulauan	15	Biringkassi	ID	BIR
443		Pangkajene Kepulauan	16	P. Kalukalukuang	ID	KKK

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
444		Pangkajene Kepulauan	17	P. Sabutung	ID	PAB
445		Pangkajene Kepulauan	18	P. Sailus	ID	SAI
446		Pangkajene Kepulauan	19	P. Sapuka	ID	SPK
447		Pare-pare	20	Pare-Pare/ Nusantara	ID	PAP
448		Pinrang	21	Marabombang	ID	MBG
449		Selayar	22	P. Jampea (Banteng)	ID	PJA
450		Selayar	23	Selayar/Benteng /Rauf Rahman	ID	YAR
451		Selayar	24	Galesong/ Takalar	ID	GGR
452		Selayar	25	P. Bonerate	ID	BOR
453		Selayar	26	P. Kalaotoa	ID	KLA
454		Selayar	27	Kayuadi	ID	KYI
455		Selayar	28	P. Jinato	ID	JNT
456		Selayar	29	P. Jampea (Ujung Toa)	ID	PJA
457		Selayar	30	Pamatata	ID	PTT
458		Sinjai	31	Sinjai/Larea-rea	ID	SLA
459		Wajo	32	Siwa/Bangsala	ID	SWA
460	Maluku Utara	Halmahera Barat	1	Jailolo	ID	JIO
461		Halmahera Barat	2	Bataka	ID	BAT
462		Halmahera Barat	3	Kedi/Loloda	ID	LLD
463		Halmahera Barat	4	Matui	ID	MUI
464		Halmahera Selatan	5	Busua	ID	BSA
465		Halmahera Selatan	6	Babang/ Labuha	ID	LBH
466		Halmahera Selatan	7	Laiwui	ID	LII
467		Halmahera Selatan	8	Mafa	ID	MFA
468		Halmahera Selatan	9	Bisui	ID	BSI
469		Halmahera Selatan	10	Manu/ Gamumu	ID	GMM
470		Halmahera Selatan	11	Pulau Kayoa	ID	PLY
471		Halmahera Selatan	12	Indari	ID	IDI
472		Halmahera Selatan	13	Koititi	ID	QOT
473		Halmahera Selatan	14	Labuha	ID	LAH
474		Halmahera Selatan	15	Loleo Jaya	ID	LEA
475		Halmahera Selatan	16	Madopolo/ Jojame	ID	MJJ

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
476		Halmahera Selatan	17	Makian	ID	MIN
477		Halmahera Selatan	18	Pasipalele	ID	PPE
478		Halmahera Selatan	19	Pelita	ID	PEL
479		Halmahera Selatan	20	Pigaraaja	ID	PRJ
480		Halmahera Selatan	21	Saketa	ID	SKA
481		Halmahera Selatan	22	Wayauwa	ID	WYA
482		Halmahera Selatan	23	Yaba	ID	YBA
483		Halmahera Tengah	24	Weda	ID	WED
484		Halmahera Tengah	25	Banemo	ID	BNO
485		Halmahera Tengah	26	Paniti	ID	PNI
486		Halmahera Tengah	27	P. Gebe	ID	GGE
487		Halmahera Tengah	28	Patani	ID	PTI
488		Halmahera Tengah	29	Sagea	ID	SJA
489		Halmahera Tengah	30	Sepo	ID	SEO
490		Halmahera Tengah	31	Tapaleo/ Gemia	ID	TPL
491		Halmahera Timur	32	Buli	ID	BUI
492		Halmahera Timur	33	Bicoli	ID	BCI
493		Halmahera Timur	34	Dorosagu	ID	DOU
494		Halmahera Timur	35	Manitingting	ID	MIG
495		Halmahera Timur	36	Subaim/ Wasile	ID	SBM
496		Halmahera Utara	37	Tobelo	ID	TBO
497		Halmahera Utara	38	Dama	ID	DAA
498		Halmahera Utara	39	Dorume	ID	DRE
499		Halmahera Utara	40	Galela	ID	GLX
500		Halmahera Utara	41	Kao	ID	KKO
501		Kepulauan Sula	42	Falabisahaya	ID	FTA
502		Kepulauan Sula	43	Sanana	ID	SQN
503		Kepulauan Sula	44	Dofa	ID	DOA
504		Kepulauan Sula	45	Malbufa	ID	MBF
505		Kepulauan Sula	46	Mangoli	ID	MGL
506		Pulau Morotai	47	Daruba	ID	DAR
507		Pulau Morotai	48	Wayabula	ID	WYB
508		Pulau Morotai	49	Bere - Bere	ID	BEE
509		Pulau Taliabu	50	Loseng	ID	LSG

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
510		Pulau Taliabu	51	Tikong	ID	TQO
511		Ternate	52	Bastiong	ID	BIG
512		Ternate	53	Ternate/ A.Yani	ID	TTE
513		Ternate	54	Mangga Dua	ID	MGP
514		Ternate	55	Moti	ID	MOI
515		Ternate	56	Tifure	ID	TFE
516		Tidore Kepulauan	57	Soasio/ Goto	ID	SIO
517		Tidore Kepulauan	58	Gita/ Payahe	ID	PYH
518		Tidore Kepulauan	59	Maidi/ Lifofa	ID	LFA
519		Tidore Kepulauan	60	Sofifi	ID	SFI
520	Maluku	Ambon	1	Ambon	ID	AMQ
521		Ambon	2	Batu Merah	ID	BUH
522		Ambon	3	Gudang Arang	ID	GDA
523		Buru	4	Namlea	ID	NAM
524		Buru	5	Air Buaya	ID	ABA
525		Buru Selatan	6	Leksula	ID	LUA
526		Buru Selatan	7	Fogi	ID	FOI
527		Buru Selatan	8	Namrole	ID	NRE
528		Buru Selatan	9	Ambalau	ID	ABL
529		Kepulauan Aru	10	Dobo	ID	DOB
530		Kepulauan Aru	11	Batu Goyang/ Kalar-Kalar	ID	BYG
531		Kepulauan Aru	12	Benjina	ID	BNA
532		Kepulauan Aru	13	Kobroor	ID	KOB
533		Kepulauan Aru	14	Marlasi	ID	MLS
534		Kepulauan Aru	15	Taberfane	ID	TEE
535		Maluku Barat Daya	16	Arwala / Sutilarang	ID	ASG
536		Maluku Barat Daya	17	Kisar	ID	KXR
537		Maluku Barat Daya	18	Leti	ID	LEI
538		Maluku Barat Daya	19	Wonreli	ID	WNI
539		Maluku Barat Daya	20	Dawelor	ID	DAW
540		Maluku Barat Daya	21	Damar	ID	DMR
541		Maluku Barat Daya	22	Eray	ID	ERY
542		Maluku Barat Daya	23	Hila/Romang	ID	RMG
543		Maluku Barat Daya	24	Ilwaki	ID	IWI
544		Maluku Barat Daya	25	Kaiwatu/Moa	ID	KWU

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
545		Maluku Barat Daya	26	Kroing	ID	KOG
546		Maluku Barat Daya	27	Lakor	ID	LAR
547		Maluku Barat Daya	28	Lerokis	ID	LKS
548		Maluku Barat Daya	29	Lirang	ID	LGN
549		Maluku Barat Daya	30	Lurang	ID	LRN
550		Maluku Barat Daya	31	Mahaleta	ID	MHE
551		Maluku Barat Daya	32	Marsela	ID	MRL
552		Maluku Barat Daya	33	Serwaru	ID	SWU
553		Maluku Barat Daya	34	Tepa	ID	TPA
554		Maluku Barat Daya	35	Upisera	ID	UIA
555		Maluku Barat Daya	36	Wulur	ID	WUR
556		Maluku Tengah	37	Amahai	ID	AHI
557		Maluku Tengah	38	Tulehu	ID	TUH
558		Maluku Tengah	39	Banda Naira	ID	NDA
559		Maluku Tengah	40	Wahai	ID	WBA
560		Maluku Tengah	41	Banda Besar	ID	BDB
561		Maluku Tengah	42	Kobisadar	ID	KBD
562		Maluku Tengah	43	Saparua/ Haria	ID	RUH
563		Maluku Tengah	44	Tuhaha	ID	THH
564		Maluku Tengah	45	Wolu	ID	WLU
565		Maluku Tengah	46	Bula	ID	BLA
566		Maluku Tenggara	47	Elat	ID	ELA
567		Maluku Tenggara Barat	48	Saumlaki	ID	SXK
568		Maluku Tenggara Barat	49	Adault	ID	AAT
569		Maluku Tenggara Barat	50	Larat	ID	LRT
570		Maluku Tenggara Barat	51	Seira	ID	SRX
571		Maluku Tenggara Barat	52	Tutu Kembong	ID	TKM
572		Seram Bagian Barat	53	Waisarisa	ID	WRS
573		Seram Bagian Barat	54	Buano	ID	BUO
574		Seram Bagian Barat	55	Hatu Piru	ID	HUU
575		Seram Bagian Barat	56	Kairatu	ID	KRT
576		Seram Bagian Barat	57	Manipa	ID	MNP

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
577		Seram Bagian Barat	58	Taniwel	ID	TNL
578		Seram Bagian Timur	59	Bula	ID	BUA
579		Seram Bagian Timur	60	Geser	ID	GER
580		Seram Bagian Timur	61	Bemo	ID	BMO
581		Seram Bagian Timur	62	Gorom/ Ondor	ID	GMR
582		Seram Bagian Timur	63	Kataloka/ Ondor	ID	ONR
583		Seram Bagian Timur	64	Kesui	ID	KSI
584		Seram Bagian Timur	65	Pulau Tior	ID	TIO
585		Tual	66	Tual	ID	TUA
586		Tual	67	Kur	ID	KUR
587		Tual	68	Toyando	ID	TYO
588	Papua Barat	Fak-fak	1	Fak-fak	ID	FKQ
589		Fak-fak	2	Kokas	ID	KOK
590		Kaimana	3	Kaimana	ID	KNG
591		Manokwari	4	Manokwari	ID	MKW
592		Manokwari	5	Mansinam	ID	MSN
593		Manokwari	6	Saukorem	ID	SKM
594		Manokwari Selatan	7	Oransbari	ID	ORA
595		Manokwari Selatan	8	Ransiki	ID	RSK
596		Raja Ampat	9	Saonek	ID	SOK
597		Raja Ampat	10	Fani	ID	FAI
598		Raja Ampat	11	Kabare	ID	KAE
599		Raja Ampat	12	Pam	ID	PPM
600		Raja Ampat	13	Pawi	ID	PWX
601		Raja Ampat	14	Waigama	ID	WIA
602		Raja Ampat	15	Waisai	ID	WSA
603		Sorong	16	Sorong	ID	SOQ
604		Sorong Selatan	17	Teminabuan	ID	TXM
605		Sorong Selatan	18	Seget	ID	SET
606		Sorong Selatan	19	Inawatan	ID	IWN
607		Sorong Selatan	20	Segun	ID	EGU
608		Tambrauw	21	Mega	ID	MEA
609		Tambrauw	22	Sausapor	ID	SSR
610		Teluk Bintuni	23	Bintuni	ID	NTI
611		Teluk Wondana	24	Wasior	ID	WSR
612		Teluk Wondana	25	Windesi	ID	WDI

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	No	Pelabuhan	Kode Negara	Kode Pelabuhan
613	Papua	Asmat	1	Agats	ID	AGS
614		Biak Numfor	2	Biak	ID	BIK
615		Asmat	3	Atsy	ID	ATY
616		Asmat	4	Bayun	ID	BYN
617		Asmat	5	Mumugu	ID	MMU
618		Biak Numfor	6	Pulau Owi	ID	POW
619		Boven Digul	7	Asiki	ID	ASI
620		Jayapura	8	Depapre	ID	DPE
621		Jayapura	9	Jayapura	ID	DJJ
622		Mappi	10	Bade	ID	BXD
623		Mappi	11	Eci	ID	EEI
624		Mappi	12	Moor	ID	MOO
625		Merauke	13	Merauke	ID	MKQ
626		Mimika	14	Amamapare	ID	AMA
627		Mimika	15	Pomako	ID	PMK
628		Nabire	16	Nabire	ID	NBX
629		Sarmi	17	Sarmi	ID	ZRM
630		Supiori	18	Korido	ID	KRO
631		Supiori	19	Janggerbun	ID	JGN
632		Waropen	20	Waren	ID	WRN
633		Yapen	21	Dawai	ID	DAI
634		Yapen	22	Serui	ID	ZRI
635		Yapen	23	Ansus	ID	ANS
636		Yapen	24	Poom	ID	POM

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

Lampiran II Surat Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut

Nomor : KP-487 / DDP/L / 2021

Tanggal : 29 April 2021

A. STANDARDISASI PENETAPAN KODEFIKASI PELABUHAN LAUT, WILAYAH
TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DAN
WILAYAH TERTENTU DI DARATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN

Standardisasi dalam menetapkan kodefikasi pelabuhan terdiri dari 5 (lima) karakter unik dan jelas yang menyediakan representasi kode untuk nama pelabuhan pada UN/LOCODE di mana kodefikasi tersebut menunjukkan Kode Negara berdasarkan ISO 3166. Guna mempermudah pembacaan kodefikasi pelabuhan dalam daftar kodefikasi pelabuhan, elemen kode negara dan kode pelabuhan dipisahkan oleh spasi, yang terdiri dari 2 (dua) karakter huruf yang diikuti dengan spasi dan 3 (tiga) karakter huruf untuk nama pelabuhan, misalnya XX XXX.

Nama pelabuhan diberikan jika memungkinkan dalam versi bahasa nasionalnya seperti yang diekspresikan dalam alfabet romawi menggunakan 26 karakter dari rangkaian karakter yang diadopsi untuk pertukaran data perdagangan internasional, namun jika semua permutasi yang tersedia untuk suatu negara telah habis, maka angka 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) juga dapat digunakan.

Standardisasi penetapan kodefikasi Pelabuhan Laut, Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan dan Wilayah Tertentu Di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Kodefikasi Pelabuhan terdiri dari 5 (lima) karakter unik dan jelas;
2. Huruf ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) menggambarkan kode negara;
3. Huruf ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima) merepresentasikan nama pelabuhan dan/atau nama tertentu yang identik dengan pelabuhan dimaksud.

Contoh:

NO	NAMA PROVINSI	NAMA PELABUHAN	KODE NEGARA	KODE PELABUHAN	KODEFIKASI PELABUHAN
1	XYZ	ABC	ID	XXX	ID XXX

Keterangan:

ID : Kode Negara (Kode Negara berdasarkan ISO 3166);

XXX : Kode Pelabuhan (mempresentasikan nama pelabuhan dan/atau nama tertentu yang identik dengan pelabuhan dimaksud);

ID XXX : Kodefikasi Pelabuhan.

B. STANDARDISASI PENETAPAN KODEFIKASI TERMINAL UMUM

Standardisasi penetapan kodefikasi terminal umum adalah sebagai berikut:

1. Kodefikasi terminal umum terdiri dari kode negara, kode pelabuhan laut, kode terminal dan kode dermaga;
2. Kode terminal terdiri dari 3 (tiga) karakter berupa 2 (dua) huruf diikuti 1 (satu) angka yang merepresentasikan terminal dimaksud;
3. Kode dermaga terdiri dari 3 (tiga) karakter berupa 1 (satu) huruf diikuti 2 (dua) angka yang merepresentasikan dermaga dimaksud.

Contoh:

NO	KODE PELABUHAN	NAMA TERMINAL	KODE TERMINAL	NAMA DERMAGA	KODE DERMAGA	KODEFIKASI TERMINAL UMUM
1	XXX	MULTIPURPOSE	XX1	Dermaga 1	X01	ID XXX.XX1.X01
				Dermaga 2	X02	ID XXX.XX1.X02

Keterangan:

- ID : Kode Negara (Kode Negara berdasarkan ISO 3166);
- XXX : Kode Pelabuhan (merepresentasikan nama pelabuhan dan/atau nama tertentu yang identik dengan pelabuhan dimaksud);
- XX1 : Kode Terminal (merepresentasikan terminal umum);
- X01/X02 : Kode Dermaga yang merepresentasikan dermaga pada terminal umum (menerangkan fasilitas terminal umum yang merupakan satu kesatuan dari terminal pelabuhan sebagai tempat untuk kegiatan kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang);
- ID XXX.XX1.X01 : Kodefikasi Terminal Umum (yang merepresentasikan kode Negara, Kode Pelabuhan, Kode Terminal, dan Kode Dermaga).

C. STANDARDISASI PENETAPAN KODEFIKASI TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Standardisasi penetapan kodefikasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri adalah sebagai berikut:

1. Kodefikasi terminal terdiri dari kode negara, kode pelabuhan laut, kode terminal dan kode dermaga;
2. Kode terminal terdiri dari 3 (tiga) karakter berupa 2 (dua) huruf diikuti 1 (satu) angka yang merepresentasikan terminal dimaksud;
3. Kode dermaga terdiri dari 3 (tiga) karakter berupa 1 (satu) huruf diikuti 2 (dua) angka yang merepresentasikan dermaga dimaksud.

Contoh:

NO	KODE PELABUHAN	NAMA TERSUS/ TUKS	KODE TERSUS/ TUKS	JENIS DERMAGA TERSUS / TUKS	KODE DERMAGA	KODEFIKASI TERSUS/ TUKS
1	XXX	PT AB	XX1	JETTY	X01	ID XXX.XX1.X01
			XX1	STS	X02	ID XXX.XX1.X02
		PT CD	XX2	JETTY	X01	ID XXX.XX2.X01
			XX2	STS	X02	ID XXX.XX2.X02

Keterangan:

- ID : Kode Negara (Kode Negara berdasarkan ISO 3166);
- XXX : Kode Pelabuhan (merepresentasikan nama pelabuhan dan/atau nama tertentu yang identik dengan pelabuhan dimaksud);
- XX1 : Kode Terminal (merepresentasikan, terminal khusus dan TUKS dimaksud);
- X01 : Kode Dermaga yang merepresentasikan dermaga pada terminal khusus dan TUKS dimaksud. (menerangkan fasilitas terminal khusus dan TUKS yang merupakan satu kesatuan dari terminal pelabuhan sebagai tempat untuk kegiatan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang);
- ID XXX.XX1.X01 : Kodefikasi Terminal Khusus/TUKS yang merepresentasikan Kode Negara, Kode Pelabuhan, Kode Terminal, dan Kode Dermaga.

D. FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN KODEFIKASI PELABUHAN LAUT BARU OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
(NAMA UPT)**

Nomor : 20 ..
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Usulan Kode Pelabuhan

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
c.q. Direktur Kepelabuhanan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor . . . / . . . / . . . / 2021 tentang Penetapan Kode Pelabuhan Laut dan Standardisasi Penetapan Kode Pelabuhan Laut, Terminal Umum, Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin kelancaran arus barang diperlukan daftar nama lokasi pelabuhan yang unik dan jelas dengan sistem pengkodean sebagai dasar Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan dan untuk pertukaran data perdagangan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan usulan penetapan kode pelabuhan . . . di kabupaten/kota. . . provinsi. . .

NO	NAMA PROVINSI	NAMA PELABUHAN	KODE NEGARA	KODE PELABUHAN	KODEFIKASI PELABUHAN LAUT
1	XYZ	ABC	ID	XXX	ID XXX

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Nama Pejabat
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

E. FORMAT PENETAPAN KODE TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
(NAMA UPT)**

KEPUTUSAN

(NAMA UPT)

Nomor:

TENTANG

PENETAPAN KODE TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS, DAN TERMINAL
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI BAWAH WILAYAH KERJA (NAMA UPT)

KEPALA KANTOR (NAMA UPT)

TAHUN ANGGARAN . . .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR (NAMA UPT)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin kelancaran arus barang diperlukan kode-kode yang unik dan jelas dengan sistem pengkodean yang terintegrasi melalui sistem
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengguna kode Pelabuhan di Lingkungan Kerja Pelabuhan (Nama Pelabuhan), terhadap pelayanan kapal dan pelayanan barang melalui Sistem Inaportnet, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala (Nama UPT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (NAMA UPT) TENTANG PENETAPAN KODE TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS, DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI BAWAH WILAYAH KERJA (NAMA UPT)**
- KESATU : Menetapkan Kode Terminal Umum, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Bawah Wilayah Kerja (Nama UPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Terminal Umum, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Bawah Wilayah Kerja (Nama UPT) merupakan kode unik dan jelas yang akan dibaca oleh Sistem yang berfungsi mengkomunikasikan data dalam integrasi database.
- KETIGA : Kode Terminal Umum, Terminal Khusus, dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Bawah Wilayah Kerja (Nama UPT) merupakan kode fasilitas Pelabuhan untuk pelayanan kapal dan barang yang terdapat di dalam Rencana Induk Pelabuhan (Nama Pelabuhan).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA (NAMA UPT)

Tembusan :

(NAMA PEJABAT)

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lampiran Surat Keputusan Kepala (*Nama UPT*)

Nomor :

Tanggal :

KODE TERMINAL UMUM, TERMINAL KHUSUS, DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI
BAWAH WILAYAH KERJA (*NAMA UPT*)

PELABUHAN (*NAMA PELABUHAN*)

A. PELABUHAN UMUM (*NAMA PELABUHAN*) KODE PELABUHAN SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR ... / ... / 2021 ADALAH ID XXX,

B. TERMINAL UMUM

NO	KODE PELABUHAN	NAMA TERMINAL	KODE TERMINAL	NAMA DERMAGA	KODE DERMAGA	KODEFIKASI
1	XXX	MULTIPURPOSE	XX.1	Dermaga 1	X.01	ID XXX.XX1.X01
				Dermaga 2	X.02	ID XXX.XX1.X02
NO	KODE PELABUHAN	NAMA TERMINAL	KODE TERMINAL	NAMA DE	KODE DERMAGA	KODEFIKASI
1	XXX	PETIKEMAS	XX.2	Dermaga 1	X.01	ID XXX.XX2.X01
				Dermaga 2	X.02	ID XXX.XX2.X02

C. TERMINAL KHUSUS/TUKS

NO	KODE PELABUHAN	NAMA TERSUS/ TUKS	KODE TERSUS/ TUKS	DERMAGA TERSUS / TUKS	KODE DERMAGA	KODEFIKASI
1	XXX	PT AB	XX1	JETTY	X01	ID XXX.XX1.X01
			XX1	STS	X02	ID XXX.XX1.X02
		PT CD	XX2	JETTY	X01	ID XXX.XX2.X01
			XX2	STS	X02	ID XXX.XX2.X02

Kepala Kantor

Nama Pejabat
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO